

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TEMPAT  
PERDAGANGAN ONLINE YANG MEMBIARKAN PENJUALAN  
DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG – BARANG HASIL  
PELANGGARAN HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Ahmad Wiranto**

**14501010111122**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TEMPAT PERDAGANGAN ONLINE YANG MEMBIARKAN PENJUALAN DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG-BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**

**Identitas Penulis** :

a. Nama : Ahmad Wiranto  
b. NIM : 145010101111122

**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Jangka waktu penelitian** : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pendamping Pendamping

**Dr. Ismail Navianto, SH., MH**

**NIP. 195502121985031003**

**Eny Harjati, SH., M.Hum**

**NIP. 195904061986012001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Yuliati, SH., L.LM**

**NIP. 196607101992032003**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TEMPAT  
PERDAGANGAN ONLINE YANG MEMBIARKAN PENJUALAN  
DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG-BARANG HASIL  
PELANGGARAN HAK CIPTA**

**Oleh:**

**AHMAD WIRANTO**

**NIM 145010101111122**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Oktober 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Ismail Navianto, SH.,MH**

**Eny Harjati,SH.,M.Hum**

**NIP. 195502121985031003**

**NIP. 195904061986012001**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian hukum Pidana

**Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si**

**Dr. Yuliati, SH.,L.LM**

**NIP. 196208051988021001**

**NIP. 196607101992032003**

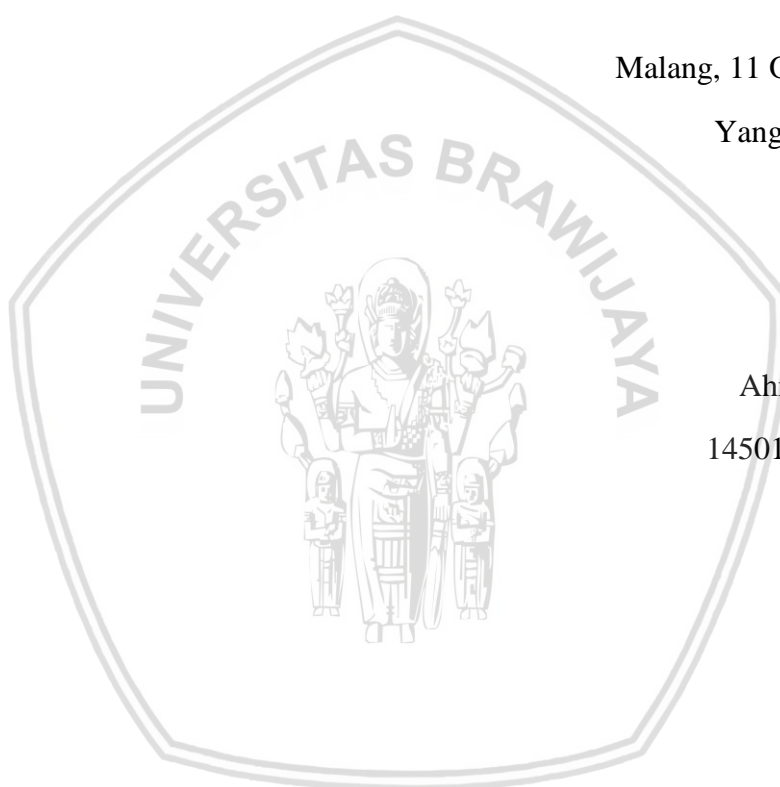
## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sertakan sumbernya.

Jika kemudian hari hasil karya ini merupakan karya orang lain saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, 11 Oktober 2018

Yang menyatakan



Ahmad Wiranto

145010101111122

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat hidaya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesainya skripsi ini.

Penulis sanga bangga dan berbahagia telah menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya yang diakhiri dengan penulisan Skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, Sh., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., L.L.M. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan pengetahuan baru dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang memberikan petunjuk dan sangat sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Orangtua penulis Bapak Suparman dan Ibu Erniwati yang selalu memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan doa hingga penulis telah sampai pada titik pencapaian saat ini.
6. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brwaijaya khusunya Andi, Akbar, Brahm, Cahyo, Cito, Dharma, Dewana, Fadhil, Imam, Militan, Tommy, Putra, Prasetyo, Robby, Sandy yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Rekan seperjuangan yang tergabung dalam grup TRABBAS khususnya Arga, Alam, Andhika, Denis, Ichsan, Kramayuda,

- Luky, Galih, Sendy, Ronny yang telah menemani, memberikan motivasi, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
8. Rekan seperjuangan yang tergabung dalam grup MBULET F.C khususnya Alam, Dimas, Kendra, Ghani, Fahmi, Wildan yang telah menghabiskan waktu bersama di Kota Malang ini.
  9. Rekan DELIMABOYS khususnya Aviv, Bachtiar, Danny, Dimas Samid, Hangga, Jeffri, Roy, Wahyu dan juga rekan Benny, Cika, Daniartana, Fatma, Farid yang telah menghabiskan waktu bersama bermain skateboard, surfing dan kegiatan seru lainnya selama penulis berada di Kota Malang.
  10. Rekan seperjuangan Kontrakan Bunga Merak yaitu Abu, Riski, Ketut, Yoga, Zaqi yang telah menemani, memberikan support dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
  11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenaan menunjukkan jalan yang benar

Malang, September 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	vi
Ringkasan.....	viii
Summary.....	ix
Daftar tabel.....	x
Daftar gambar.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Korporasi Tempat Perdagangan Online.....	24
C Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
H. Definisi Konseptual.....	40

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pengelompokan Barang-barang Hak Cipta Yang Penggunaannya Tidak Melanggar Hak Cipta.....	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Membiarkan Penjualan dan/atau Penggandaan Barang-Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta.....	48
1. Unsur Rumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	48
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tempat Perdagangan Online dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Ahmad Wiranto, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TEMPAT PERDAGANGAN ONLINE YANG MEMBIARKAN PENJUALAN DAN/ATAU PENGGANDAAN BARANG-BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA, Pembimbing I: Dr. Ismail Navianto,SH.,MH, dan Pembimbing II: Eny Harjati,SH.,M.Hum.

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan secara jelas pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan pembiaran terhadap barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Berdasarkan fakta diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah Apakah korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan penulis dianalisis menggunakan penafsiran secara gramatikal dan penafsiran sistematis

Berdasarkan hasil penelitian, Pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta menurut peraturan perundang-undangan terkait korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila anggota dari suatu korporasi telah memenuhi rumusan Pasal 114 UUHC, dengan menggunakan teori identifikasi, maka korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perbuatan yang dilakukan anggota dari suatu korporasi dipandang sebagai perwujudan sikap dan batin dari sebuah korporasi itu sendiri. Saran penulis, perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai penetapan dan pemidanaan terhadap korporasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## SUMMARY

Ahmad Wiranto, Criminal Law of the Faculty of Law, University of Brawijaya, September 2018, *CRIMINAL RESPONSIBILITY BUSINESS PLAYERS ONLINE TRADE WHICH LETS THE SALES OF GOODS RESULTING FROM COPYRIGHT*, Dr. Ismail Navianto, SH., MH, and Eny Harjati, SH., M.Hum.

*This research reveals legal issues regarding corporate criminal liability where online trading allows the sale and / or duplication of goods resulting from copyright infringement. This research is motivated by the lack of clear regulation in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright concerning criminal liability for business actors, especially corporations that have omitted the goods resulting from copyright infringement in the trading places they manage.*

*Based on the facts above, this research raises the formulation of the problem. Is a corporation where online trading allows the sale and / or duplication of goods resulting from copyright infringement can be accounted for in criminal law in Indonesia?*

*This research is a normative legal research and uses normative juridical methods using a legislative approach. Primary and secondary legal materials obtained by the authors were analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation*

*Based on the results of the research, corporate criminal liability where online trading allows the sale and / or duplication of goods resulting from copyright infringement according to laws and regulations related to corporations can be criminally accountable. If members of a corporation have fulfilled the formulation of Article 114 UUHC, by using identification theory, the corporation can be criminally accountable. Actions made by members of a corporation are seen as a manifestation of the attitude and mind of a corporation itself. The author's suggestion, it is necessary to re-examine the determination and punishment of corporations as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

## DAFTAR TABEL

Orisinalitas Penelitian .....	9
-------------------------------	---



## DAFTAR GAMBAR

Perbedaan E-Commerce dan E-Bussiness .....	26
Beberapa akun/pelapak/penjual yang melakukan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta .....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses masyarakat global itu sendiri. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting dalam kehidupan. Definisi globalisasi itu sendiri menurut Emanuel Ritcher seorang pakar politik dari Jerman mengatakan bahwa “globalisasi merupakan suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia”.

Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.<sup>1</sup> Salah satu tantangan baru akibat adanya globalisasi dalam bidang ekonomi dan pembangunan negara yakni adanya tahun pasar bebas antara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan China yang dibentuk berdasarkan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dan dimulai serentak sejak tahun 2015. Bagi Indonesia ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Alinea ketiga pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>1</sup> [https://www.kompasiana.com/sulmanhadi/pengaruh-globalisasi-terhadap-budaya\\_552ff25a6ea83436718b45e2](https://www.kompasiana.com/sulmanhadi/pengaruh-globalisasi-terhadap-budaya_552ff25a6ea83436718b45e2), Diakses pada tanggal 3 Januari 2018

Sebagai upaya untuk menghadapi pasar bebas, Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang cukup strategis agar tidak tertinggal dengan negara ASEAN lainnya dan juga demi terciptanya sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi sesuai yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945. Salah satu langkah yang harus digunakan oleh Indonesia untuk memajukan ekonominya ialah memaksimalkan penggunaan media dunia digital/internet sebagai bagian dari proses berbisnis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI kuartal I-2017 sebesar 5,01%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini jika dilihat year on year, ditopang oleh beberapa sektor, salah satunya adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,01%.<sup>2</sup> Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penggunaan internet yang melunjak yang membuat sektor informasi dan komunikasi tumbuh. Dan juga berdasarkan hasil survey Ipsos,<sup>3</sup> bahwa 69% pengguna Internet di Indonesia berselancar di internet untuk mencari barang yang ingin mereka beli, serta dari jumlah total responden sebanyak 48% melakukan pembelian barang secara *online*, sedangkan untuk responden dari Indonesia sebesar 44%.<sup>4</sup> Selain itu, peningkatan pertumbuhan perusahaan yang bergerak di sektor industri digital juga terus meningkat.

*E-Commerce* merupakan salah satu jenis perusahaan yang bergerak di sektor dunia digital. *E-Commerce* sendiri merupakan suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan

---

<sup>2</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3493664/marak-e-commerce-konsumen-mulai-beralih-ke-belanja-online>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2018

<sup>3</sup> Ipsos merupakan perusahaan riset pasar independen yang dikelola oleh para ahli riset profesional, kantor pusat berlokasi di Prancis dan salah satu kantor cabang terdapat di Indonesia

<sup>4</sup> <https://dailysocial.id/post/hasil-survei-ipsos-dan-peluang-bagi-pelaku-jual-beli-online>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2018

repository.ub.ac.id

pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>5</sup> Situs jual – beli online merupakan salah satu bentuk dari *E-Commerce*.

*E-Commerce* yang ada di Indonesia pada saat ini berkembang dan menjadi beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda - beda. Ada 7 jenis *E-Commerce* yang berkembang di Indonesia yaitu:

1. Business-to-Business (B2B);
2. Business-to-Consumer (B2C);
3. Consumer-to-Consumer (C2C);
4. Consumer-to-Business (C2B);
5. Non-business Electronic commerce/Business-to-Administration (B2A);
6. Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang dilakukan pada tahun 2010 ternyata Indonesia merupakan negara peringkat pertama pelanggar HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Asia. Indonesia juga sudah sering masuk dalam daftar “Special 301 Priority Watch List” yang dikeluarkan oleh Office of the United States Trade Representative (USTR) sejak tahun 2001.

Hak Kekayaan Intelektual menurut Jill Mc Keogh dan Andrew Stewart (1997:1) mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, HKI mempunyai 7 (tujuh) cabang yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak terkait
2. Merek
3. Paten
4. Desain Industri

<sup>5</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html>, Dikases pada tanggal 3 Januari 2018

<sup>6</sup> Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 408

<sup>7</sup> Utomo Tomi Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2



5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Industri Terpadu
7. Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (Selanjutnya disebut UUHC) dijelaskan bahwa:

hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.<sup>9</sup>

Dalam UUHC juga disebutkan bahwa Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan tempatnya menjual barang pelanggaran hasil hak cipta<sup>10</sup> dan ancaman pidana jika tempat perdagangan melanggar pasal 10 UUHC dipidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),<sup>11</sup> dengan kata lain dalam UUHC tersebut pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab mengawasi dan mengontrol barang-barang yang dijual di tempat perdagangannya. Mengenai tempat perdagangan dalam bentuk non fisik (*online*) juga termasuk kedalam kategori tempat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUHC. Kata “tempat” dalam rumusan Pasal 10 UUHC tidak hanya meliputi ruangan fisik saja namun, juga sesuatu yang dapat menampung dalam hal ini kegiatan perdagangan

---

<sup>8</sup> Ibid hlm. 7-8

<sup>9</sup> Penjelasan umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Pasal 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.

<sup>11</sup> Pasal 114 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segal bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah).



dalam sebuah situs dalam tempat perdagangan online.<sup>12</sup> Namun, dalam rumusan Pasal 114 UUHC tidak mengatur secara rinci mengenai jika badan usaha (dalam hukum pidana disebut korporasi) yang melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab ketika korporasi melakukan tindak pidana, padahal dalam rumusan Pasal 1 angka (27)<sup>13</sup> UUHC mengakui adanya badan hukum sebagai subjek tindak pidana namun tidak mengatur bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana jika yang melakukan tindak pidana adalah korporasi dan/atau pengurus.

Pada dasarnya untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diuntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup>

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.<sup>15</sup> Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, ada 2 (dua) pandangan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pada pandangan monistis memandang unsur pembuat delik sebagai bagian dari tindak pidana (tidak adanya pemisahan antara

---

<sup>12</sup> Kanina Cakreswara, **Tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online atas pelanggaran Hak Cipta**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (27) Undang –undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:  
(27) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, **Perbuatan dan Pertanggungjawaban; Dua Pengerntian Dasar dalam Hukum Pidana**, Aksara Baru, Jakrta, 1983, hlm. 89

<sup>15</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 120

*mens rea* (pertanggungjawab pidana) dan *actus reus* (perbuatan pidana). Sedangkan pada pandangan dualistis memisahkan antara unsur *mens rea* dan *actus reus*. Apabila seseorang diajukan sebagai pelaku tindak pidana korporasi yang bertanggungjawab adalah korporasi dengan syarat–syarat antara lain:

- a. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperuntukkan oleh anggota korporasi atau didalam struktur organisasi korporasi memiliki jabatan sebagai *directing mind* dari korporasi;
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau pemberi perintah dalam lingkup jabatannya di korporasi;
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan penghapus pidana untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana (Putusan PT Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011).<sup>16</sup>

Selain itu, setidaknya ada 3 (tiga) parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi yaitu:

1. Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi (asas legalitas);

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, **Masalah Korporasi Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Dibidang Hak Kekayaan Intelektual**, Varia peradilan, 2016, hlm. 90-91

2. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur atau manger yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi;
3. Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi merek sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya.

Pada tahun 2016 lalu, Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap penjual software Microsoft Windows Corporation bajakan di kawasan Glodok, Mangga Dua, Jakpus. Pelaku menjual perangkat lunak bajakan tersebut seharga Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu.<sup>17</sup> Kasus tersebut dilaporkan setelah adanya pengguna perangkat lunak *microsoft* yang mengeluhkan perihal *microsoft* tidak bisa di upgrade dan setelah ditelusuri product key dari *microsoft* tersebut tidak ditemukan dengan kata lain bajakan. Dalam kasus ini ada salah satu tersangka yang menjual salah satu produknya di situs jual-beli online (Forum jual-beli KasKus. Berdasarkan pasal 114 UUHC seharusnya pengelola situs jual-beli online tersebut patut ditetapkan juga sebagai yang bertanggungjawab atas penjualan barang bajakan *microsoft* sebab, secara tidak langsung pengelola situs

---

<sup>17</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3232073/polisi-tangkap-penjual-software-microsoft-windows-bajakan-di-glodok>, Di akses pada tanggal 3 Februari 2018

jual-beli online tersebut telah mempermudah akses penjualan barang bajakan tersebut dengan tidak cermat mengelola situsnya.<sup>18</sup>

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai “Pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang - barang hasil pelanggaran hak cipta”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Apakah korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.

## **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Peneliti dalam hal ini, sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan peneliti lampirkan penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> Masruchin Ruba'i, **Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, 2014, hlm. 200-201

pembahasan penelitian ini, sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu:

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul/ Tema	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Kanina Cakreswar a	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	2016	Tanggungja wab Tempat Perdagangan Online atas Pelanggaran Hak Cipta	1. Bagaimana Pengaturan di negara lain mengenai tempat perdagangan online yang menjual barang yang melanggar hak cipta?  2. Apakah Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai tempat perdagangan online?	Penlitian ini lebih fokus terhadap apabila suatu korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UUHC, siapakah yang

					3. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan online yang melakukan pembiaran terhadap penjualan barang yang melanggar hak cipta?	bertanggungjawab
--	--	--	--	--	--	------------------

Sumber data: Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada masalah perbandingan Undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia dengan Undang-undang yang mengatur hak cipta di negara lain. Kemudian perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti memfokuskan kepada siapakah yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam rumusan Pasal 114 UUHC. Dari penjelasan tersebut, bahwa peneliti dalam penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang baru dan orisinil.

## E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan hukum pidana materiil khususnya berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta tambahan ilmu pengetahuan mengenai peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum untuk membentuk ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta.



## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis ilmiah hukum. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka ini membahas teori dan konsep yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Pembahasan bab ini berisikan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang korporasi tempat perdagangan online, dan tinjauan umum tentang pelanggaran hak cipta.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang langkah-langkah yang dipakai untuk melaksanakan penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual.

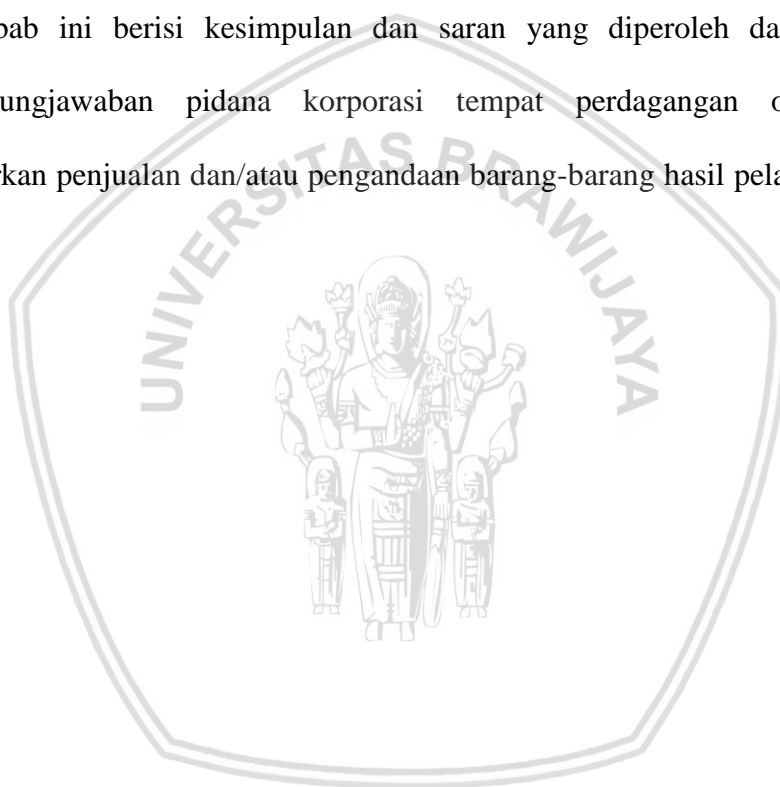


#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan hasil dan analisis terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dengan asas kesalahan (asas *culpabilitas*), asas kesalahan ini memiliki nilai keadilan, dimana asas ini harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana harus dilandasi dengan asas kesalahan, namun dalam beberapa hal, asas kesalahan ini dapat diingkari. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pandangan monisme mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat 3 (tiga) unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>2</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: “untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

<sup>2</sup> Ibid hlm. 63

dipertanggungjawabkan”.<sup>3</sup> Dengan kata lain, sebelum mempersoalkan pertanggungjawaban pidana dari suatu tindak pidana, harus dipastikan terlebih dahulu siapakah pembuat dalam tindak pidana tersebut. Namun, dalam kenyataannya sangat sulit untuk menentukan siapa si pembuat. Selain itu, jika si pembuat telah ditentukan, persoalan selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat apakah si pembuat memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi sebelumnya.

### **1.1. Kemampuan bertanggungjawab**

Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>4</sup> Tidak mampu bertanggungjawab mengakibatkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu jika seseorang melakukan tindak pidana dan ditemukan keadaan mental seseorang tersebut masuk kedalam kategori ketidakmampuan bertanggungjawab maka seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan (pidana) tersebut. Adapun maksud dari ‘ketidakmampuan’ mengutip perkataan dari pengacara terkemuka Di Amerika Edmond Cahn: “Maksud dari ‘ketidakmampuan’, yaitu tidak mampu membedakan yang benar dan

---

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 82

<sup>4</sup> Ibid hlm. 91

yang salah dalam arti umum”.<sup>5</sup> Pembuat sebenarnya tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu bentuk tindak pidana.

## 1.2. Kesalahan

Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.<sup>6</sup> Ketika seseorang melakukan tindak pidana tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.<sup>7</sup> Sekalipun, perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dan dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dibenarkan, belum tentu seseorang tersebut dapat memenuhi syarat penjatuan pidana. Untuk mempertanggungjawabkan seseorang dalam suatu tindak pidana, haruslah seseorang tersebut mempunyai kesalahan (*subjective guilt*). Dalam hal ini berlaku asas yang disebut asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Maksud dari adagium tersebut pembuat tindak pidana dapat bertanggungjawab apabila pembuat memenuhi unsur yang terdapat dalam kesalahan.

Dengan adanya kesalahan, tindak pidana yang dilakukan seseorang menjadi sah. Dengan perkataan lain, kesalahan merupakan syarat yang mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, diperlukan kesengajaan atau kealpaan mutlak disyaratkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Chairul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, Jakarta, Prenada Media, 2005, Hlm. 95

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>7</sup> H. Stiyono, **Kejahatan Korporasi “Analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia”**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 101

<sup>8</sup> *Schaffmeister D, Keijzer N, & Sutorius PH*, J.E Sahetapy, Agustinus Pohan (Eds.), **Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 79

## 1) Kesengajaan

Definisi Kesengajaan dapat dilihat dalam memori penjelasan *Wetboek Van Strafrecht* 1809 yaitu “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.

Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak (*willens theorie*) namun juga dapat berarti mengetahui (*voor stelling theorie*). Jadi kesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Kesengajaan secara berurut dapat disusun sebagai berikut :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *opzet bij mogelijksbewustzijn*).<sup>10</sup>

## 2) Kealpaan

Pada kealpaan si petindak tidak memiliki unsur niat jahat berbeda dengan kesengajaan yang mana si petindak menghendaki dan memiliki niat untuk berbuat jahat. Namun bukan berarti kealpaan dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi si petindak. Menurut *Memorie Van Toelichting* alasan yang memungkinkan pembedaan bagi kealpaan

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 103

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 104

adalah karena pada kealpaan ada keadaan sedemikian yang membahayakan keamanan orang atau barang.<sup>11</sup>

## **2. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

### **2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Istilah korporasi dalam hukum pidana dan istilah korporasi dalam hukum perdata memiliki perbedaan, dimana dalam hukum perdata korporasi hanyalah sebatas badan usaha yang dapat melakukan perbuatan hukum atau yang disebut sebagai badan hukum. Sedangkan korporasi dalam konteks hukum pidana tidak hanya badan hukum namun juga badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Korporasi dalam hukum pidana di Indonesia sudah diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disingkat Perma 13/2016) “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Identifikasi korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, dilakukan dengan melihat apakah korporasi dalam lalu lintas masyarakat dipandang menentukan terjadinya keadaan terlarang. Berbeda halnya dengan subjek hukum manusia yang menempatkan keadaan batin pembuat sebagai unsur kesalahan. Dalam korporasi, syarat kesalahan dilihat dari apakah korporasi dalam menjalankan usahanya tersebut membuat kebijakan tertentu agar tidak terkena

---

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 111

tindak pidana. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sangat penting sebab, kebanyakan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi berdampak terhadap masyarakat baik itu berdampak positif ataupun dampak yang negatif. Elliot dan Quin mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggungjawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:

1. Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana padahal, perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan;
2. Lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya;
3. Perusahaan pada dasarnya memiliki kondisi keuangan yang cukup untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada membebankan kepada pegawainya;
4. Dengan adanya ancaman pidana terhadap perusahaan mendorong para pemegang saham dari perusahaan tersebut untuk ikut mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan;
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, Op cit, 2005, Hlm. 100



seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu;

6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk memperingati para pegawainya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar pegawai tersebut mencari perolehan laba dengan kegiatan yang legal bukan sebaliknya;
7. Dengan pemberitaan yang merugikan perusahaan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat mencegah perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan karakteristik subjek hukum pidana. Mengenai hal tersebut, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>14</sup>

Untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, maka persyaratan pada umumnya menyangkut segi perbuatan dan segi orang

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, **Asas-asas Hukum Pidana Korporasi**, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 104-105

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 83



(sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana).<sup>15</sup> Artinya, perlu ditetapkan terlebih dahulu perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Namun, tidak semua tindak pidana yang menetapkan pengurus sebagai pelaku tindak pidana menjadikan korporasi tersebut tidak akan mengulangi lagi bahkan bukan tidak mungkin akan ada korporasi lain yang melakukan tindak pidana serupa. Hal ini disebabkan karena dalam hal penjatuhan pidana terhadap pengurus misalnya pidana denda, jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan korporasi lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan di masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya.<sup>16</sup> Selain itu, untuk menentukan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tetap mengacu terhadap 3 unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi sebelumnya (lihat bagian Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban pidana) namun, terdapat asas yang meniadakan kesalahan sebagai salah satu unsur pertanggungjawabana pidana korporasi yaitu, asas *strict liability* atau *liability without fault*. Dalam asas ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan langsung kepada pelaku tanpa perlu dibuktikan adanya "*mens rea*" yaitu adanya kesalahan atau kesengajaan atau niat jahat dari si pelaku.

## 2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sangat banyak jenisnya namun, secara umum di Indonesia sendiri mengenal 3 teori mengenai

<sup>15</sup> I Dewa Made Suarta, **Hukum Pidana Korporasi**, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 41

<sup>16</sup> Ahmad Mayani, **Pertanggungjawab Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta**, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2018, Hlm. 43-44

teori pertanggungjawaban pidana korporasi yakni, *strict liability*, *vicarious liability* dan *identification theory*.

#### 1. Strict Liability;

Teori ini berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan langsung kepada pelaku tindak pidana tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan yang ada dalam diri si pelaku.<sup>17</sup> Di Indonesia, teori ini dimasukkan dalam Pasal 39 Ayat (1) Rancangan KUH Pidana (Selanjutnya disebut RKUHP) yang menyebutkan:

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.<sup>18</sup>

L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam strict liability aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat penting untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat,
- 2) Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dengan diadopsinya teori Strict Liability kedalam hukum positif di Indonesia membuat korporasi sebagai subjek hukum

<sup>17</sup> Ibid. Hlm. 52

<sup>18</sup> Pasal 39 ayat (1) Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

<sup>19</sup> Mahrus Ali, Op.cit, 2013, Hlm 113-114

pidana menjadi semakin mudah untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 38 RKUHP mengatakan bahwa asas ini dapat diterapkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai, tanggungjawab sosial dan kesejawatan yang didukung oleh suatu kode etik.

## 2. Vicarious Liability.

Menurut teori ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat seseorang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi melakukan suatu kejahatan dengan tujuan menguntungkan korporasinya. Tidak peduli apakah tindakan pekerja tersebut telah menghasilkan keuntungan atau tidak. Juga tidak diperdulikan apakah aktivitas tersebut dilarang atau tidak oleh korporasinya.<sup>20</sup>

Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief bahwa:

Vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>21</sup>

Rasionalitas penerapan dalam teori ini adalah karena korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh

<sup>20</sup> Ahmad Mayani, Op.cit, 2018, Hlm. 54

<sup>21</sup> Mahrus Ali, Op.cit, 2013, Hlm. 119

korporasi.<sup>22</sup> Penekanan dalam teori ini ialah harus ada hubungan antara pelaku dengan pihak pengganti dan adanya kewajiban hukum yang dilanggar. Di Indonesia pengadopsian teori ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) RKUHP:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.<sup>23</sup>

Strict Liability dan Vicarious Liability merupakan pengecualian adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang berarti, (*mens rea*) tidak mutlak berlaku.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tempat Perdagangan Online**

### **1. Definisi Tempat Perdagangan Online**

Tidak ada definisi secara umum maupun khusus dalam UUHC maupun dalam hukum positif di Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan tempat perdagangan. Menurut UU Perdagangan mendefinisikan perdagangan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut KBBI) mendefinisikan tempat sebagai ruang yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, mengumpulkan, dan sebagainya), ruang (bidang dan sebagainya) yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, mengumpulkan, dan sebagainya), sesuatu yang dapat (dipercaya) menampung. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tempat

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Pasal 39 Ayat (2) Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>24</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Undang – undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

perdagangan ialah ruang yang difungsikan untuk bertransaksi barang dan/atau jasa didalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan.

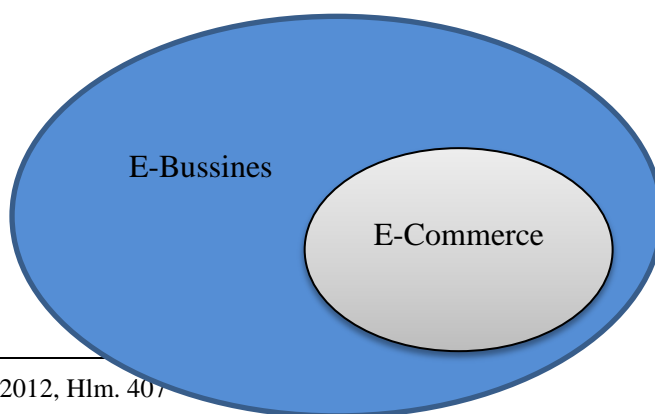
Dalam istilah hukum bisnis, tempat perdagangan online dapat juga disebut sebagai *e-commerce*. Munir Fuady berpendapat bahwa:

E-commerce merupakan kegiatan berbisnins dengan teknologi elektronik sebagai media yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>25</sup>

*E-commerce* berbeda dengan *E-Bussines* dalam hal bentuk kegiatannya, dimana *E-commerce* dalam melakukan transaksi jual-beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antarmitra bisnis dengan menggunakan fasilitas internet. Sedangkan *E-bussines* mencakup tidak hanya transaksi online, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang antar mitra bisni, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.<sup>26</sup>

**Bagan 2.1**

### **Perbedaan *E-commerce* dan *E-bussines***



<sup>25</sup> Munir Fuady, Op.cit., 2012, Hlm. 407

<sup>26</sup> Ibid, Hlm.407

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2018

## 2. Jenis dan Macam Tempat Perdagangan Online

Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan industri maupun perekonomian di Indonesia membuat *e-commerce* mengalami perkembangan juga salah satunya terlihat dari keberagaman jenis *e-commerce* yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 6 (enam) jenis *e-commerce* yang mempunyai karakteristik yang berbeda – beda yakni:<sup>27</sup>

### 1) Business to Business (B2B)

B2B *e-commerce* memiliki karakteristik para pelaku bisnis merupakan perusahaan. Umumnya, *e-commerce* yang berkembang di Indonesia kebanyakan menggunakan jenis ini. B2B ini terdiri dari:

- a. Transaksi *Inter-Organizational Systems* (IOS), misalnya transaksi extranets, *electronic funds transfer*, *electronic forms*, *integrated messaging*, *share data based*, *supply chain management*, dan lain-lain.
- b. Transaksi pasar elektronik (*electronic market transaction*).

### 2) Business to Consumer (B2C)

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, Op.cit., 2012, Hlm. 408

B2C adalah *e-commerce* yang para pelaku bisnisnya merupakan perusahaan dan konsumen akhir. Layaknya pasar tradisional, dimana para penjual dapat bertemu secara langsung dengan konsumen akhir dalam hal ini pembeli, juga berlaku terhadap jenis *e-commerce* ini.

Jenis ini sangatlah mudah untuk dikembangkan sehingga sifatnya sangat dinamis, namun juga akibat dari mudahnya jenis ini menimbulkan penyebaran pertumbuhan yang tidak merata. Jenis *e-commerce* ini berkembang dengan sangat cepat karena kebutuhan masyarakat akan mudahnya bertransaksi di internet, terlebih munculnya website-website yang menjual beragam kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

### 3) *Consumer to Consumer (C2C)*

C2C merupakan jenis *e-commerce* yang memiliki karakteristik dimana para pelaku bisnis dapat menjadi pembeli begitu pula sebaliknya, konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.<sup>29</sup>

### 4) *Consumer to Business (C2B)*

C2B adalah jenis *e-commerce* dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis *e-commerce* ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya.

<sup>28</sup> <https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/> Diakses pada tanggal 5 Januari 2018

<sup>29</sup> Munir Fuady, Op.cit., 2012, Hlm. 409



### 5) *Business to Administration (B2A)*

*Business to Administration (B2A)* atau dalam buku Munir Fuady dikenal sebagai *Non-Business electronic Commerce* adalah jenis *e-commerce* yang memiliki karakteristik para pelaku bisnis merupakan perusahaan dan administrasi publik yang dikelola oleh pemerintah.

Jenis *e-commerce* ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketengakerjaan, dokumen, register, dan layanan publik lainnya.

Jenis *e-commerce* ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik *e-government*.

### 6) *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.

## C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

### 1. Definisi dan Perlindungan Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC adalah:



“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta dalam hal pemberian hak eksklusif yang diatur di dalam UUHC dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Hak Cipta (Pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta;
2. Hak terkait atau *neighbouring rights* (pasal 1 angka 5) meliputi:
  - a) Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan;<sup>30</sup>
  - b) Producers fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain;<sup>31</sup>
  - c) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Perlindungan Hak Cipta sendiri dalam UUHC terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut UUHC yaitu “Hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk”

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan ketepatan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>33</sup>

Sedangkan hak ekonomi menurut UUHC yaitu: “ Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”<sup>34</sup>.

Hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam UUHC ini menjadikan pencipta untuk dapat melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.<sup>35</sup>

Mengenai ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni.

- a. *“buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*

<sup>33</sup> Pasal 5 Undang – undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>34</sup> Pasal 8 Undang – undnag Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>35</sup> Pasal 9 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Portet;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”<sup>36</sup>

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat *original* adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.<sup>37</sup> Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Seni tari (koreografi)
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
- f. Karya arsitektur.<sup>38</sup>

Ciptaan yang bersifat turunan derivatif adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ciptaan turunan terdiri dari:

<sup>36</sup> Pasal 40 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>37</sup> Yusran Isnaini, 2009, **Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space**, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29-30

<sup>38</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, **Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia**, Jakarta: Rabbani Press, hlm. 32

- a. Karya pertunjukan seperti, karya rekaman video karawitan, televisi, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, drama dan film, serta musik;
- b. Cermah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. Karya Sinematografi;
- d. Peta;
- e. Karya rekaman atau suara bunyi;
- f. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai;
- g. Karya fotografi; dan
- h. Program komputer.<sup>39</sup>

## 2. Definisi Pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta

Definisi Pencipta menurut UUHC adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.”<sup>40</sup> Adapun yang disebut sebagai pencipta ialah:

- a. *Orang yang disebut dalam ciptaan;*
- b. *Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;*
- c. *Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;*
- d. *Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.*<sup>41</sup>

Berdasarkan UUHC ada 2 (dua) kategori pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

- a) Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan. Jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan dikerejakan oleh

<sup>39</sup> Yusran Isnaini, *Loc.cit.*

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta

<sup>41</sup> Pasal 31 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta

orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.<sup>42</sup>

b) Badan Hukum

Badan hukum juga dapat memiliki karya cipta, baik badan hukum yng berbentuk badan hukum privat maupun badan hukum publik. Apabila badan hukum melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUHC dimana ciptaan tersebut berasal dari badan hukum itu sendiri, tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta maka, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum(privat).<sup>43</sup> Namun, ketika ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan antara instansi pemerintah, yang dianggap sebagai pencipta ialah instansi pemerintah dalam hal ini badan hukum publik.<sup>44</sup> Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara.<sup>45</sup>

### 3. Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta

Ketentuan pidana pada UUHC mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bidang hak cipta dan hak terkait serta ancaman hukuman terhadap pelanggaran larangan tersebut.

---

<sup>42</sup> Pasal 34 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta

<sup>43</sup> Pasal 37 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>44</sup> Lihat pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah

<sup>45</sup> Lihat pasal 39 ayat(1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta “dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta”.

Adapun pasal-pasal yang memuat perbuatan yang dilarang (ketentuan pidana) oleh UUHC terdapat dalam pasal 112-120. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau meanggara perjanjian.<sup>46</sup> UUHC tidak memperkenankan perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

- 1) Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual-belikan kepada masyarakat luas;
- 2) Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertahanan atau keamanan; atau
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD).<sup>47</sup>

Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah pasal 114 UUHC yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10<sup>48</sup>, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah).”

---

<sup>46</sup> Ahmad Munawar & Taufik Efendy, **Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta**, Al’Adl, Vol. VIII No.2, 2016, Hlm.36

<sup>47</sup> Ahmad Munawar & Taufik Efendy, *Loc.cit*

<sup>48</sup> Pasal 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:



Dengan adanya pengaturan pidana di dalam undang-undang hak cipta, berarti pembentuk undang-undang telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hak cipta. Pada hakekatnya, kriminalisasi merupakan salah satu dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan hukum pidana sebagai media/sarana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam setiap kriminalisasi pasti ada maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu.<sup>49</sup>



---

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.

<sup>49</sup> Ari Wibowo, **Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya**, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.1 Vol. 22, 2015, hlm. 57



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif ini dengan pertimbangan bahwa fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti antara lain:

- Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini peneliti mengkaji Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan teknologi Informasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>1</sup> Berikut bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti:

- a) Pasal 1 angka (27), 10 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599;
- b) Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 141

<sup>2</sup> Ibid

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan tema penelitian;
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dalam dunia digital seperti: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Jurnal hukum Al'Adl.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- b) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

##### **2. Akses Internet**

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses situs-situs dalam jaringan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis bahan hukum normatif. Peneliti akan mengkaji seluruh bahan hukum dan bahan non hukum relevan yang telah terkumpul dan dihubungkan dengan teori yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan penafsiran dengan metode interpretasi hukum yuridis normatif. Metode interpretasi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan interpretasi gramatikal untuk menerjemahkan yang berkenaan dengan pengertian dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pasal 15 ayat (2), dan (3) UU ITE, unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam pasal 10, dan pasal 114 UUHC, dan materi lain yang bersangkutan dengan bahan hukum dalam penelitian ini.
- b) Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya, baik dalam undang – undang yang sama maupun dengan undang – undang yang lain.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan interpretasi

<sup>3</sup> <http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>4</sup> <http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2018

sistematis untuk menerjemahkan suatu norma dengan cara menafsirkan norma tersebut dari kaidah yang lebih tinggi menuju norma yang tingkatannya sederajat. Penafsiran ini digunakan terhadap produk hukum yang mengatur atau berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online atas barang-barang pelanggaran hak cipta dalam pasal 10 dan 114 UUHC, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU ITE.

#### **F. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

##### **1) Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.

##### **2) Korporasi**

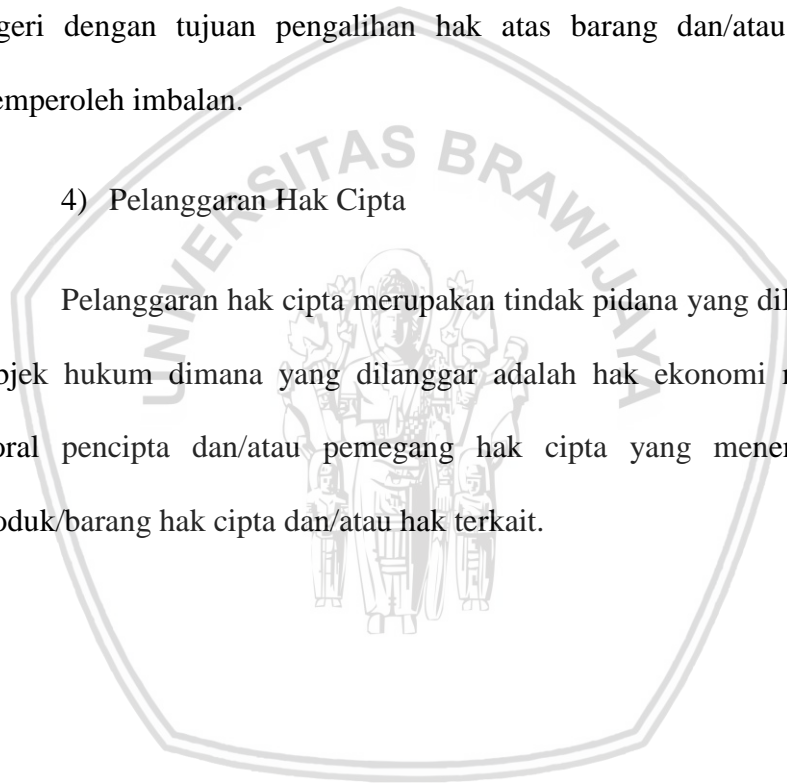
Korporasi merupakan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam konteks hukum pidana.

### 3) Tempat Perdagangan Online

Tempat perdagangan online merupakan ruang yang difungsikan untuk bertransaksi barang dan/atau jasa didalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan.

### 4) Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dimana yang dilanggar adalah hak ekonomi maupun hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang menempel dalam produk/barang hak cipta dan/atau hak terkait.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengelompokan Barang-barang Hak Cipta Yang Penggunaannya Tidak Melanggar Hak Cipta**

Pada dasarnya tidak semua tindakan penggunaan hak cipta tanpa seizin pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hak cipta sebagai hak milik juga memiliki fungsi sosial, dimana masyarakat dapat menggunakan tanpa izin dari pencipta. Dalam UUHC ada 8 Pasal yang mengatur mengenai tindakan penggunaan barang hak cipta tanpa izin yang tidak melanggar hak cipta yakni: Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 51 dimana dari ke-8(delapan) pasal tersebut pada dasarnya masyarakat (sebagai subjek hukum yang bukan merupakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta) diperbolehkan menggunakan produk/barang hak cipta tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta selama penggunaannya tidak bertujuan untuk penggunaan secara komersial. Khusus untuk Pasal 45 UUHC sendiri, penulis ingin menjabarkan secara rinci karena berkaitan program komputer sebagai salah satu objek hak cipta dan juga produk yang sering diperjual-belikan dalam tempat perdagangan online.

1) Pasal 45 UUHC merumuskan sebagai berikut:

*“(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:*



- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.”<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal diatas, Seorang pengguna program komputer yang bukan merupakan pemegang hak cipta dapat membuat 1(satu) salinan atas program komputer dengan tujuan untuk penelitian dan pengembangan program komputer tersebut, ketika penggunaan program komputer tersebut telah berakhir, salinan atas program komputer tersebut harus dimusnahkan agar tidak ada pihak lain yang menggunakan tanpa hak.

Pasal 9(1)UUHC<sup>2</sup> mengatur mengenai hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta dimana juga secara eksplisit melarang adanya tindakan hak ekonomi atas suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Gambar 4.1

<sup>1</sup> Pasal 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup> Pasal 9 (1)Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan

## Beberapa akun/pelapak/penjual yang melakukan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta



Pada gambar 4.1 bagian terdapat akun-akun penjual yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh barang hasil pelanggaran hak cipta yang terdapat dalam gambar tersebut adalah penjualan produk *'license key'* sebuah sistem operasi komputer dari brand *'microsoft'*. Umumnya, Ada 3 cara yang paling sering digunakan untuk mendapatkan *'license key'* sistem operasi komputer dari *'microsoft'* yakni:

### 1. FPP (*Full Package Product*)

Lisensi ini memiliki *license key* dan COA (*Certificate of Authenticity*) yang berada di dalam box produk (untuk COA berada di bagian samping box) dimana box produk tersebut berisi DVD installer (32-bit ataupun 64-bit), buku panduan dan *license key*. Apabila nantinya pembeli akan mengganti komputer/laptop, untuk pemasangan windows cukup memindahkan *license key* ke komputer/laptop baru pembeli. Untuk mendapatkan jenis lisensi ini cukup membeli di laman microsoft store ataupun toko retail resmi dengan kisaran harga 1-3 juta rupiah tergantung jenis windows yang akan dibeli.

## 2. OEM (*Original Equipment Manufacture*)

Lisensi ini memiliki *license key* yang melekat di hardware komputer/laptop (biasanya di bagian motherboard dan prosesor). Adapun COA lisensi ini terdapat pada bagian CPU (*Central Processing Unit*) dari sebuah laptop/komputer. Jadi untuk mendapatkan jenis lisensi ini satu-satunya cara adalah dengan membeli laptop/komputer yang *license key* dan COA sudah tertempel dan terpasang. Ketika *hardware* dari *license key* tersebut rusak, untuk mendapatkan kembali *license key* tersebut, pemilik harus membeli *hardware* dengan jenis yang sama.

## 3. OLP (*Open License Program*)

Cara perolehan lisensi ini melalui perjanjian antara pihak microsoft dan pihak pembeli lisensi yang biasanya adalah sebuah perusahaan, universitas, ataupun instansi pemerintah yang membutuhkan lebih dari 5 *license key* (mempunyai lebih dari 5 laptop/komputer).

Pada bagian gambar 4.1 bagian situs lazada.co.id terdapat penjualan license key windows dengan jenis OEM dimana untuk mendapatkan jenis lisensi OEM pada dasarnya haruslah membeli laptop/komputer yang hardware ataupun procesornya telah menempel lisensi beserta COA windows. Dengan demikian, akun tersebut melanggar ketentuan UUHC Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UUHC<sup>3</sup> dan dapat dikenakan pidana dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC<sup>4</sup>. Adapun unsur dari rumusan Pasal 113 UUHC ialah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

- 1) Pembuat: Setiap orang
- 2) Perbuatan: Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta

b. Unsur Objektif

- 1) Objeknya: hak ekonomi pencipta yang dilanggar adalah: Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan.

Berdasarkan unsur dari rumusan Pasal 113 UUHC diatas dapat diketahui bahwa, akun penjual pada gambar 4.1 melakukan perbuatan pendistribusian tanpa

---

<sup>3</sup> Pasal 9 Ayat (1) Huruf (e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasl 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

(e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.

<sup>4</sup> Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentnag Hak Cipta:

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

hak dan/atau tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari produk windows.

Pengaturan mengenai tindakan yang melarang adanya penggunaan hak ekonomi pencipta atas suatu ciptaannya dalam UUHC juga berdampak terhadap kegiatan penyelenggaraan dalam tempat perdagangan online, terlebih dengan adanya Pasal 10 UUHC yang melarang adanya penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan online.

Setelah menjabarkan beberapa pasal dalam UUHC terkait tindakan penggunaan barang hak cipta tanpa izin yang tidak melanggar hak cipta serta memberikan contoh indikasi pelanggaran hak cipta dalam bentuk gambar diketahui bahwa terdapat akun-akun yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam tempat perdagangan online. Selanjutnya, mengenai siapa yang harus mempertanggungjawabkan apabila dalam tempat perdagangan online diketahui terjadi pembiaran pelanggaran hak cipta, peneliti akan mengemukakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi yang membiarka penjualan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Membiarkan Penjualan dan/atau Penggandaan Barang-barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta**

### **1. Unsur Rumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Sebelum peneliti membahas unsur pertanggungjawaban pidana korporasi yang membiarkan penjualan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta, terlebih dahulu peneliti akan membahas unsur dari rumusan Pasal 114 UUHC.

Mengenai ketentuan yang mengatur pelarangan pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta termuat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).<sup>5</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 UUHC adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola tempat perdagangan;
- 2) Membiarkan;
- 3) Penjualan dan/atau penggandaan;
- 4) Barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Adapun ketentuan pidana terhadap korporasi yang memenuhi rumusan pasal 10 UUHC terdapat dalam pasal 114 UUHC<sup>6</sup>. Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 UUHC:

a. Unsur Subjektif

---

<sup>5</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta berbunyi: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.

<sup>6</sup> Pasal 114 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.”



- 1) Pembuat: Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya
- 2) Perbuatan: Dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan.

b. Unsur Objektif

- 1) Objeknya: Barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Untuk dapat memidanakan korporasi tempat perdagangan online, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 UUHC. Berikut peneliti akan menjabarkan kata per kata dari rumusan Pasal 114 UHC:

- 1) Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dengan segala bentuknya.

“Orang” menurut KBBI merupakan “manusia, dirinya sendiri, manusianya sendiri”. Ruang lingkup “orang” menurut KBBI masihlah sebatas manusia itu sendiri, untuk memasukkan korporasi kedalam unsur “setiap orang” diperlukan definisi lain yang sesuai yakni “badan”. “Badan” menurut KBBI adalah “jasad, raga, awak, sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu”. Sedangkan menurut rumusan Pasal 1 angka (27) UUHC merupakan “orang perserangan atau badan hukum”. Jadi ada 2 subjek hukum yang diakui oleh UUHC yakni orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). “mengelola” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disingkat KBBI) berasal dari kata “Kelola” yang artinya orang yang mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya), mengurus



(perusahaan, proyek, dan sebagainya).<sup>7</sup> Tidak ada definisi secara khusus dalam hukum positif di Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan pengelola, Namun jika melihat pengertian pengelola menurut KBBI, Pengelola juga dapat diartikan sebagai Pelaku Usaha. Arti kata Pelaku Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara per kata, Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan<sup>8</sup>, sedangkan ‘Usaha’ merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>9</sup> Menurut pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merumuskan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan”.<sup>10</sup>

Jika melihat pengertian pelaku usaha menurut UU Perdagangan dan pengertian “korporasi” menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Selanjutnya disebut Perma 13/2016)<sup>11</sup>, dimana keduanya mengatur badan usaha

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/kelola>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2018

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2018

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2018

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

dalam bentuk apapun (berbadan hukum maupun bukan badan hukum) sebagai subjek hukum.

Mengenai pengertian tempat perdagangan menurut KBBI mendefinisikan tempat sebagai ruang yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, mengumpulkan, dan sebagainya), ruang (bidang dan sebagainya), sesuatu yang dapat (dipercaya) menampung.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tempat perdagangan ialah ruang yang difungsikan untuk bertransaksi barang dan/atau jasa didalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan. Selanjutnya mengenai kata ‘segala bentuknya’ dalam tempat perdagangan dalam segala bentuknya, peneliti menguraikan sebagai berikut:

- a) Segala berarti sekalian (tidak ada kecualinya), semua, seluruh, segenap;<sup>13</sup>
- b) Bentuk berarti rupa, wujud, sistem, susunan.<sup>14</sup>

Dengan melihat uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa tempat perdagangan online juga termasuk kedalam kategori tempat perdagangan menurut UUHC. Karena, tempat bukan hanya ruang fisik (dapat disentuh, dipegang) untuk menaruh barang dagangan melainkan juga ruang non fisik (tak dapat disentuh, dipegang namun dapat dilihat) untuk menampung barang dagangan. Sistem dan kegiatan yang dilakukan tempat perdagangan online layaknya tempat perdagangan yang berbentuk fisik pada umumnya (memiliki struktur organisasi kepengurusan

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tempat>, Online Diakses pada tanggal 15 Juli 2017

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/segala>, (Online) Diakses pada tanggal 15 Juli 2017.

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bentuk>, (Online) Dikases pada tanggal 15 Juli 2017.

menurut perundang-undangan yang berlaku, bertemunya penjual dan pembeli dalam kegiatan berdagang online).

- 2) Dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan

Setelah itu mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut KBBI adalah memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, dimaksudkan (direncanakan), dibuat-buat. Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsafan, dan sengaja dengan keinsafan kemungkinan.

- (1) Sengaja dengan maksud dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan memang mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu dalam artian, orang tersebut menghendaki akibat dari perbuatannya;
- (2) Sengaja dengan keinsafan dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan sadar akan akibat yang dikehendakinya namun, sadar juga akan akibat lain yang tidak dikehendaki dari perbuatan yang dilakukannya;
- (3) Sengaja dengan keinsafan kemungkinan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan akibat tertentu tetapi disamping itu ia mungkin akan

mengakibatkan suatu tindak pidana lain yang tidak dikehendakinya.<sup>15</sup>

Kata 'sengaja' dalam rumusan Pasal 114 UUHC, berarti sengaja dengan keinsafan kemungkinan dimana pelaku tindak pidana mengetahui dan sadar akan adanya penjualan barang pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan online yang dikelolanya namun, pelaku tidak melakukan tindakan menghapus konten/barang pelanggaran hak cipta (melakukan perbuatan dengan tidak melakukan tindakan apapun) malahan pelaku membiarkan konten tersebut tetap ada di tempat perdagangannya, dimana perbuatannya tersebut berakibat adanya penjualan dan/atau penggandaan barang pelanggaran hasil hak cipta.

Kata 'mengetahui' menurut KBBI ialah memaklumi, menyaksikan, tahu akan, menyadari, menginsafi.<sup>16</sup> 'Mengetahui' dalam rumusan Pasal 114 UUHC ialah adanya barang pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Kata 'membiarkan' menurut KBBI ialah tidak melarang, tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik.<sup>17</sup> Dalam hukum pidana, membiarkan merupakan delik omisi (*omission act*). Delik ini mewajibkan seseorang untuk melakukan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang apabila ia tidak melakukan kewajiban hukum tersebut maka, ia telah melakukan tindak pidana pasif (delik omisi).<sup>18</sup> Ketika kewajiban hukum tersebut tidak dilakukan maka, pelaku dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan 2(dua) hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa

<sup>15</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, **Hukum Pidana**, Malang, Setara Press, 2015, Hlm. 225-226

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengaja>, (Online) Diakses pada tanggal 16 Juli 2018

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat), Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm. 186

<sup>18</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 129

maksud dari kata ‘Membiarkan’ dalam rumusan Pasal 114 UUHC ialah korporasi mengetahui adanya barang pelanggaran hak cipta namun, pelaku tidak melakukan tindakan (berupa penghapusan barang ataupun pemblokiran akun) terhadap barang pelanggaran hak cipta tersebut. Pelaku memiliki kewenangan penuh terhadap hal-hal yang terdapat dalam tempat perdagangannya namun, memilih untuk tidak melakukan apa-apa, padahal diketahui bahwa dengan ‘tidak berbuat sesuatu’nya pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum terhadapnya.

Penjualan berasal dari kata ‘jual’ yang berarti tukar sesuatu dengan uang. Menurut Basu Swastha dalam bukunya berjudul “Azas-azas Marketing” mengatakan bahwa penjualan ialah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual, untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>19</sup> Adapun kata ‘penggandaan’ berasal dari kata ‘ganda’ yang berarti kali, lipat. ‘Penjualan’ dalam rumusan Pasal 114 UUHC berarti Penjual selaku pengirim<sup>20</sup> melakukan kegiatan (promosi) yang mengajak penerima<sup>21</sup> selaku calon pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijualnya. Sedangkan ‘penggandaan’ disini berarti penjual melipatkan beberapa kali atau memperbanyak, dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu barang

---

<sup>19</sup> <http://www.gurupendidikan.co.id/8-pengertian-penjualan-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/>, (Online) Diakses pada tanggal 17 Julii 2018

<sup>20</sup> Yang dimaksud pengirim menurut Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

“Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari pengirim.”

<sup>21</sup> Yang dimaksud penerima menurut Pasal 1 angka (19) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

“Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim”

pelanggaran hak cipta, yang pada awalnya memang sudah ada dan menjadi banyak.

- 3) Barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Barang merupakan benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), muatan selain manusia atau ternak<sup>22</sup>. Adapun barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang dimaksud dalam rumusan Pasal 114 UUHC adalah barang yang melanggar ketentuan UUHC. Menurut UUHC yang dimaksud pelanggaran hak cipta adalah barang/produk yang melekat suatu hak cipta padanya yang oleh karena itu selain pencipta atau pemegang hak cipta, untuk melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUHC<sup>23</sup>, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau hak terkait. Jadi, pada dasarnya kegiatan untuk melakukan hak ekonomi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau hak terkait yang dilarang oleh UUHC dimana kegiatan tersebut berujung pada terciptanya barang pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait. Pasal 1 angka (23) UUHC merumuskan sebagai berikut:

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op cit, 2011, Hlm. 139

<sup>23</sup> Pasal 8 Undang-undnag Nomor 28 Thun 2014 tentang Hak Cipta:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (23) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta



Berdasarkan pasal 1 angka (23), ada 2 (dua) bentuk pelanggaran hak cipta yakni penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait serta pendistribusian barang hasil penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Setiap korporasi tempat perdagangan online diharuskan untuk mengelola tempat perdagangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Pasal 10 UUHC dan Pasal 15 ayat (1) UUIE<sup>25</sup>). Berkaitan dengan pengelolaan yang harus dilakukan korporasi tempat perdagangan online, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memberikan penjelasan dengan mengedarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Elektronik Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content (Selanjutnya disingkat SE Menkominfo No.05/2016) dalam bagian V dijelaskan mengenai kewajiban dan Tanggungjawab Penyedia Platform UGC yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban Penyedia Platform UGC meliputi:
  - a. Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan Platform UGC yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Kewajiban dan hak pedagang (merchant) atau pengguna dalam menggunakan layanan platform UGC;
    - 2) Kewajiban dan hak penyedia Platform dalam melaksanakan kegiatan usaha Platforms UGC;

---

<sup>25</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“(1) Setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”



3) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah.

b. Menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di Platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan informasi paling sedikit meliputi:

- 1) Tautan (link) yang spesifik mengarah ke konten yang dilarang;
- 2) Alasan/dasar laporan konten yang dilarang;
- 3) Bukti-bukti penunjang laporan. Seperti screenshot, pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.

c. Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan dan/atau menyertakan informasi tambahan lainnya terkait dengan aduan/atau pelaporan dalam hal diperlukan;
- 2) Melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang;
- 3) Memberikan notifikasi ke pedagang (Merchant) bahwa konten yang diunggahnya adalah konten yang dilarang;
- 4) Menyediakan sarana bagi pedagang (Merchant) untuk melakukan sanggahan bahwa konten yang diunggahnya

bukan konten yang diunggahnya bukan konten yang dilarang;

5) Menolak aduan/atau pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang.

d. Menyediakan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang:

1) Untuk konten yang dilarang yang mendesak adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima oleh penyedia platform UGC. Konten yang dilarang mendesak termasuk, namun tidak terbatas pada:

- i. Produk barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan;
- ii. Produk barang/jasa yang mengancam keamanan negara;
- iii. Perdagangan manusia dan/atau organ tubuh manusia;
- iv. Terorisme dan/atau;
- v. Konten lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2) Konten yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Huruf Romawi V Huruf B selain konten yang dilarang yang mendesak adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima penyedia platform UGC;

3) Konten yang dilarang sebagaimana disebutkan pada Huruf Romawi V Huruf B angka 1 huruf e yakni konten yang

berkaitan dengan barang dan/jasa yang memuat konten yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak aduan dan/atau pelaporan diterima oleh penyedia platform UGC dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.

- e. Melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif terhadap kegiatan penyelenggaraan pedagang (Merchant) dalam platform UGC;
  - f. Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tanggungjawab Penyedia Platform UGC meliputi:
- a. Berattanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten didalam platform secara andal, aman, dan bertanggungjawab.
  - b. Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang(Merchant) atau pengguna platform.<sup>26</sup>

Dengan melihat ketentuan yang dirumuskan dalam SE Menkominfo No.05/16 diketahui bahwa pengelolaan yang harus dilakukan korporasi tempat perdagangan online dalam hal ini untuk melindungi barang-barang hak cipta yang ada di dalam tempat perdagangan onlineya meliputi:

---

<sup>26</sup> Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Elektronik Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content.

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pihak pedagang(pengguna sistem elektronik) dalam platform/tempat perdagangannya;
- 2) Menyediakan sarana pelaporan bagi tiap user/pengunjung apabila ditemukan konten yang melanggar hak cipta dalam platform/tempat perdagangan online;
- 3) Apabila ditemukan laporan bahwa ditemukan konten yang diduga melanggar hak cipta, korporasi tempat perdagangan online/penyedia platform diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten tersebut, setelah itu memberikan notifikasi terhadap akun yang melanggar hak cipta bahwa konten yang di unggahnya merupakan konten yang melanggar hak cipta, selain itu penyedia platform juga diwajibkan memberikan kesempatan bagi akun yang melanggar hak cipta untuk memberikan sanggahan;
- 4) Memberikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang.

## **2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tempat Perdagangan Online dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Selanjutnya, mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, peneliti akan mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai definis dari pertanggungjawaban pidana. Menurut Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul

“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’” mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang/pembuat terhadap terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>27</sup>

Adapun menurut Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Korporasi ‘Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi’” berpendapat bahwa:

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.<sup>28</sup>

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana menjadikan si pembuat patut dipidana terhadap perbuatannya berdasarkan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Namun, tidak selamanya setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menentukan apakah si pembuat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas yakni kesengajaan dan kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata “korporasi” sebagai subjek hukum bagi badan usaha. Hal ini penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain itu dalam Pasal 1 angka (1) Perma 13/2016 yang juga menyebutkan hal serupa dengan rumusan Pasal 1 angka (14) UU Perdagangan Adapun penjelasan dari syarat pertanggungjawaban pidana dikaitkan

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op cit*, 2005, Hlm. 68

<sup>28</sup> Mahrus Ali, **Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi)**, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, Hlm. 40

dengan korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta:

1. Kemampuan bertanggungjawab.

Korporasi tempat perdagangan online sebagai subjek hukum dikatakan mampu bertanggungjawab ketika ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya (kehendak batin) itu. Sebagai badan hukum, korporasi dalam hal ini tempat perdagangan online (*E-commerce*) tidak memiliki kehendak batin. Namun, dengan menggunakan konsep kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh pegawai tempat perdagangan online (perbuatan itu merupakan kewenangan dan fungsinya menurut Anggaran Dasar Rumah Tangga tempat perdagangan online) merupakan perbuatan yang dilakukan tempat perdagangan online dimana pegawai tersebut bekerja, dengan ketentuan perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan tempat perdagangan online.<sup>29</sup> Selain itu untuk mewujudkan tujuan dari korporasi itu sendiri menggunakan akal dan perbuatan manusia dalam hal ini para pengurus korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat dikatakan bertanggungjawab apabila para pengurus korporasi tersebut memiliki 3 (tiga) kemampuan, yaitu:

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali, Op.cit, 2008, Hlm. 37

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>30</sup>

Korporasi tempat perdagangan online baik orang (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dijalankan oleh para pengurusnya, memiliki ketiga kemampuan diatas karena 2(dua) kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh orang yang jiwanya sehat, sedangkan seseorang yang tidak memiliki 2(dua) kemampuan tersebut mengindikasikan bahwa jiwanya tidak sehat atau dalam bahasa hukum berada dalam pengampuan (*curatale*) sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata seseorang harus tidak berada dalam pengampuan.<sup>31</sup>

## 2. Kesalahan dalam arti luas yakni kesengajaan dan kealpaan;

Untuk kesengajaan telah penulis bahas pada halaman 52 dimana dalam hukum pidana di Indonesia dikenal 3(tiga) bentuk kesengajaan yakni sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsafan, dan sengaja dengan keinsafan kemungkinan.

<sup>30</sup> Moeljatno, Op.cit, 2009, Hlm.178-179

<sup>31</sup> Pasal 1330 KUH Perdata: "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang permepuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."



Mengenai kealpaan, yang dimaksud disini ialah *culpa lata* (kealpaan yang berat). Kealpaan merupakan sikap batin seseorang yang melakukan perbuatan namun, tidak membayangkan akibat yang akan terjadi berdasarkan perbuatannya tersebut. Kealpaan ini berbeda dengan ‘kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan’. Perbedaan yang mendasar ialah terletak pada “sikap batin” si pembuat, dimana dalam ‘kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan’ si pembuat menyadari akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya sedangkan, kealpaan si pembuat tidak menyadari akan akibat dari perbuatan yang ditimbulkannya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta harus mengetahui dan dengan sengaja membiarkan barang tersebut dijual di tempat perdagangan yang dikelolanya. ‘Mengetahui’ dan ‘membiarkan’ merupakan sinonim dari kesengajaan, yakni ‘kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan’.

### 3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana disamping alasan pembenar. Maksud dari alasan pemaaf ialah perbuatan pidana yang dilakukan pembuat tetap bersifat melawan hukum namun, si pembuat tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan, dengan kata lain kesalahan yang dilakukan pembuat menjadi hapus. Untuk mengetahui dalam hal apa saja si pembuat

---

<sup>32</sup> Zainal abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 340-343

memiliki alasan pemaaf dapat dilihat dalam Pasal 48<sup>33</sup>, 49(2)<sup>34</sup>, dan 51(2)<sup>35</sup> KUH Pidana .

Alasan pemaaf yang pertama ialah daya paksa (Pasal 48 KUH Pidana), pengertian daya paksa dari rumusan Pasal 48 KUH Pidana ialah daya paksa dalam arti sempit (*vis compulsiva*), artinya seseorang melakukan perbuatan pidana karena adanya tekanan psikis yang datang dari orang lain sehingga membuat orang tersebut melakukan perbuatan pidana.

Alasan pemaaf yang kedua adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung diakibatkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat. Parameter yang dijadikan patokan dalam alasan pemaaf yang kedua ini adalah perbuatan pembelaan yang dilakukan tidak seimbang dengan sifat dari serangan ha ini disebabkan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat/karena perasaan yang sangat tergoncang.<sup>36</sup>

Alasan pemaaf yang terakhir ialah melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik. Seseorang tidak dapat dipidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan berdasarkan perintah

---

<sup>33</sup> Pasal 48 KUH Pidana: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

<sup>34</sup> Pasal 49 (2) KUH Pidana: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

<sup>35</sup> Pasal 51(2) KUH Pidana: “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

<sup>36</sup> Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 158-160

atasan namun, tidak mengetahui bahwa perintah tersebut adalah tidak sah.<sup>37</sup>

Berdasarkan 3 syarat pertanggungjawaban pidana diatas, khusus untuk kesalahan sangat sulit diterapkan apabila pembuatnya adalah korporasi. Ini dikarenakan kesalahan adalah mengenai persoalan jiwa yang mana dalam korporasi tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam suatu tindak pidana diperlukan teori yang mengecualikan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yakni *strict liability theory* dan *vicarious liability theory*. Menurut *strict liability theory*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tanpa mencari unsur '*mens rea*' yang ada dalam korporasi. Jadi, cukup dengan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, korporasi sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Eko Purwanto yang merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta dalam wawancaranya kepada hukumonline.com, "Cukup fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium '*res ipsa loquitur*', fakta sudah berbicara sendiri,"<sup>38</sup>. Jadi untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam suatu tindak pidana tertentu tidak mutlak adanya '*mens rea*'. Begitu pula dengan *vicarious liability theory*, yang pada dasarnya asas ini menerapkan prinsip '*employment principle*'. Maksudnya adalah bos/majikan dalam hal ini korporasi bertanggungjawab atas semua

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 163

<sup>38</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52425fd246110/menghukum-korporasi-harus-hati-hati>, diakses pada tanggal 14 Juli 2018

perbuatan yang dilakukan karyawannya.<sup>39</sup> Kristian mengutip tulisan V.S Khanna dalam tulisannya yang berjudul “*Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminality Liabel?*” mengemukakan terdapat 3(tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Agen melakukan suatu kejahatan;
- 2) Kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan;
- 3) Kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat bagi korporasi.<sup>40</sup>

Selain kedua teori diatas yang mengecualikan ‘asas tiada pidana tanpa kesalahan’ terdapat juga *identificaion theory* (teori identifikasi) dimana teori ini menganggap perbuatan anggota korporasi yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya sebagai anggota korporasi merupakan perbuatan dari korporasi itu sendiri.<sup>41</sup> Mengenai perbuatan siapakah yang juga merupakan perbuatan dari korporasi, jika melihat teori identifikasi yang diartikan secara sempit maka perbuatan dari pejabat senior atau *directing mind* berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) yang merupakan perbuatan korporasi. Sedangkan jika melihat teori ini yang diartikan secara luas, tidak hanya pejabat senior saja yang merupakan perbuatan dari korporasi, melainkan anggota dibawahnya pun juga merupakan perbuatan dari korporasi itu sendiri.<sup>42</sup> Hal ini juga diperkuat dengan adanya teori pelaku fungsional yang sebelumnya sudah penulis singgung sedikit pada pembahasan kemampuan bertanggungjawab sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Teori pelaku fungsional ini pada dasarnya

<sup>39</sup> Kristian, **Kejahatan Korporasi (di era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)**, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 181

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Mahrus Ali, op cit., 2008, Hlm. 51

<sup>42</sup> Kristian, op cit., 2016, Hlm. 246

menganggap korporasi sebagai pembuat tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatannya secara fisik, dengan perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya pun sudah dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri dengan ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan pegawainya masih dalam lingkup pekerjaannya sebagai anggota dari korporasi. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh korporasi diwujudkan melalui perbuatan dilakukan oleh manusia dalam hal ini anggota korporasi yang perbuatannya secara umum dipandang sebagai perbuatan korporasi.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketiga teori pertanggungjawaban pidana korporasi diatas, diketahui bahwa korporasi perdagangan online yang berbentuk badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, menurut peneliti teori yang paling tepat yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan sebuah korporasi berdasarkan rumusan Pasal 114 UUHC yang sekarang adalah teori identifikasi. Karena, apabila anggota dari sebuah korporasi tersebut (dalam hal ini karyawan yang bertanggungjawab mengawasi dan mengelola produk yang diperjual-belikan dalam tempat perdagangan online) memenuhi unsur dari rumusan Pasal 114 UUHC maka, berdasarkan teori identifikasi korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berbeda halnya dengan vicarious liability dimana untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak mensyaratkan adanya kesalahan, kesalahan hanya dimiliki oleh anggota dari korproasi itu sendiri, korporasi tidak memiliki kesalahan. Rumusan Pasal 114 UUHC juga mensyaratkan adanya kesalahan yakni “dengan sengaja dan mengetahui”. Selain itu rumusan Pasal 114

---

<sup>43</sup> Hasbullah F. Sjawie, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Kencana**, Jakarta, 2015, Hlm. 54-55

UUHC juga tidak mengatur mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dengan menggunakan vicarious liability, Pasal 114 UUHC dirumuskan sebagai berikut:

*“(1) Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dilakukan oleh anggota dari badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut.”*

Selain itu, Jika melihat teori penyertaan dalam KUH Pidana, menurut peneliti tindak pidana penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta yang dilakukan di tempat perdagangan online oleh pihak penjual juga secara tidak langsung ditimbulkan oleh korporasi tempat perdagangan online yakni sebagai pembantu tindak pidana. Pasal 56 KUH pidana merumuskan sebagai berikut:

*“Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:*

*Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*

*Ke-2. Mereka yang sengaja memmmberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”<sup>44</sup>*

Dengan mengkaitkan antara Pasal 56 KUH Pidana dengan penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa korporasi tempat perdagangan online dapat dipidana

---

<sup>44</sup> Pasal 56 KUH Pidana



sebagai pembantu tindak pidana (memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan). Dimana korporasi tempat perdagangan online dengan sengaja mempermudah pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh pihak penjual (menjual barang pelanggaran hak cipta) terlepas apakah pihak penjual telah melaksanakan (telah berhasil menjual barang pelanggaran hak cipta) kejahatannya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap turut sertanya perbuatan pembantuan yang dilakukan oleh korporasi tempat perdagangan online.<sup>45</sup>

Pasal 15 Ayat (2) merumuskan sebagai berikut:

“(2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya”.

Pasal 15 Ayat (3) merumuskan sebagai berikut:

“(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem”.

Penyelenggara sistem elektronik disini berarti korporasi tempat perdagangan online. Korporasi yang menjalankan usaha tempat perdagangan dalam bentuk aplikasi maupun situs online. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU ITE, penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab penuh terhadap seluruh sistem penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun, hal ini tidak dapat berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian adalah merupakan akibat dari pihak pengguna sistem (dalam hal ini penjual ataupun pembeli).

---

<sup>45</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, Op.cit, 2015, Hlm. 143



Menurut KBBI, memaksa berasal dari kata paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dalam hukum pidana, keadaan memaksa disebut juga sebagai daya paksa. Menurut *Memorie Van Toelichting* KUH Pidana, daya paksa adalah “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan” Daya paksa dibagi menjadi 2(dua) yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Dalam keadaan daya paksa yang absolut, si pembuat sama sekali tidak dapat memilih perbuatan dan akibat yang akan terjadi karena disebabkan oleh keadaan diluar kehendak batin pembuat (bisa karena keadaan alam ataupun kekuatan manusia).<sup>46</sup> Adapun daya paksa yang relatif merupakan keadaan yang sebenarnya si pembuat kejahatan masih mempunyai pilihan untuk tidak melakukan kejahatan namun, karena adanya paksaan yang ditimbulkan oleh orang lain yang pada akhirnya si pembuat melakukan tindak pidana. Daya paksa relatif merupakan salah satu alasan pemaaf dalam hukum pidana. Jadi yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam rumusan Pasal 15 ayat (3) UUIE adalah daya paksa relatif.

Jika melihat rumusan Pasal 15 ayat (3) UUIE kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas menurut hukum pidana yakni kesengajaan. Untuk membuktikan kesengajaan pembuat, berdasarkan teori membayangkan yang dipopulerkan oleh Reinhard von Frank seorang guru besar di Tubingen pada tahun 1907 dalam “karangannya berjudul “*ueber den aufbau des schuldbegriffs*”. Menurut beliau:

Adalah sengaja apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu

<sup>46</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat beliau peneliti berpendapat bahwa, untuk membuktikan kesengajaan pembuat terlebih dahulu harus membuktikan perbuatan tersebut memang untuk melakukan akibat yang menyertainya.

Jadi, Pasal 15 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan khusus dimana penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi keadaan memaksa, kesalahan, ataupun kelalaian dari pihak pengguna sistemnya.



---

<sup>47</sup> Zainal abidin Farid, *op.cit*, 2010, Hlm. 284

Jika Pasal 114 UUHC dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU ITE mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tempat perdagangan online yang membiarkan barang penjualan pelanggaran hak cipta, diketahui bahwa korporasi tempat perdagangan online dapat dipertanggungjawabkan dengan kondisi:

1. Korporasi mengetahui adanya barang pelanggaran hak cipta yang dijual di tempat perdagangan onlinenya (diketahuinya barang tersebut bisa dari laporan masyarakat melalui sistem laporan yang sudah disediakan oleh korporasi ataupun dari korporasi itu sendiri dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap tempat perdagangannya) namun, korporasi tersebut tidak melakukan tindakan (seperti menghapus barang tersebut ataupun menotifikasi akun yang menjual barang tersebut untuk segera menghapus barang yang dijualnya).
2. Tidak adanya kesalahan ataupun kelalaian dari pihak penjual.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut, yaitu:

1. Korporasi tempat perdagangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan bahwa korporasi harus mengetahui adanya indikasi produk/barang yang melanggar hak cipta namun, tidak melakukan tindakan apapun untuk memeriksa, menghapus dan/atau memblokir akun penjual yang melanggar hak cipta.
2. Badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum juga dapat ditetapkan sebagai subjek hukum dalam rumusan Pasal 114, dengan mengacu definisi “korporasi” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi serta definisi “pelaku usaha” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Dengan menggunakan teori identifikasi suatu badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana unsur dari rumusan Pasal 114 UUHC yang telah dipenuhi oleh anggota badan usahanya dipandang sebagai perwujudan sikap dan batin dari sebuah badan usaha itu sendiri.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka beberapa saran yang akan peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai penetapan dan pembedaan terhadap badan usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk penggunaan istilah badan hukum perlu kiranya untuk mengganti dengan istilah korporasi agar konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bagi korporasi tempat perdagangan online, diharapkan agar benar-benar memahami konsekuensi dari penerapan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dalam mengelola dan mengambil kebijakan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 114.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adami Chazawi. 2011 *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mayani. 2018. *Pertanggungjawab Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta*. R.A.De.Rozarie: Surabaya.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2005. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Prenada Media.
- Gatot Supramono. 2016. *Masalah Korporasi Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Dibidang Hak Kekayaan Intelektual*. Varia peradilan.
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Luank Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press
- H. Stiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi "Analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia"*. Malang: Bayumedia Publishing.
- I Dewa Made Suarta. 2015. *Hukum Pidana Korporasi*. Malang: Setara Press.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi (di era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penaggulangan Kejahatan Korporasi)*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Masruchin Ruba'i. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung,: Citra aditya Bakti.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Schaffmeister D, Keijzer N, & Sutorius PH, J.E Sahetapy, Agustinus Pohan (Eds.). 2011. *Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Utomo Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undng–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road map E-Commerce) Tahun 2017-2019

#### **JURNAL:**

Ahmad Munawar & Taufik Efendy. 2015. *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta*. Al'Adl. Vol. VIII No.2. 2016



Ari Wibowo. *Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No.1 Vol. 22.

Kanina Cakreswara. 2016. *Tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online atas pelanggaran Hak Cipta*. Tesis Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia

#### INTERNET:

<http://indonesiaindonesia.com/f/90732-awal-internet-indonesia>

<http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3493664/marak-e-commerce-konsumen-mulai-beralih-ke-belanja-online>

<https://dailysocial.id/post/hasil-survei-ipsos-dan-peluang-bagi-pelaku-jual-beli-online>

<http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56e68f6f918ff/badan-usaha-yang-aman-untuk-berbisnis-ie-commerce-i>

<https://news.detik.com/berita/d-3232073/polisi-tangkap-penjual-software-microsoft-windows-bajakan-di-glodok>

<https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>

<https://www.asmp.org/copyright-tutorial/brief-history-copyright/>

<http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum>